

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh
ISMELIA FATHONAH
NPM : 1621030278
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh
ISMELIA FATHONAH
NPM : 1621030278

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Jual beli termasuk dalam masalah Muamalah dan *maqasid* untuk muamalah adalah kemaslahatan antar umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan Jual beli pakaian bekas impor marak terjadi di Indonesia, hal tersebut menjadi lahan bisnis tersendiri bagi oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar. Pakaian bekas impor diperjualbelikan dengan harga variasi, baik dengan harga terjangkau atau murah apabila dibandingkan dengan pakaian baru, sehingga masyarakat mudah tergair membali pakaian bekas impor.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua segi hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor, kemudian bagaimana persamaan dan perbedaan perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor, kemudian mengetahui persamaan dan perbedaan perpektif hukum positif dan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku *literature* dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relavan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan. Setelah data terkumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan jual beli pakaian bekas impor dilarang dalam hukum positif dan hukum Islam, karena pakaian bekas mengandung bakteri dan jamur yang berbahaya sehingga berpotensi mengganggu kesehatan manusia jika dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Selain itu, berdampak pula pada perekonomian negara. Sanksi apabila terbukti mengimpor pakaian bekas dalam hukum positif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau hukuman denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan sanksi dalam hukum Islam yaitu hukuman *ta'zir* karena belum ada ketentuannya secara tegas dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadist, sehingga dalam menentukan bentuk dan ukuran hukumannya diserahkan kepada hakim atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman. Perbedaan dalam hukum positif dan hukum Islam terletak pada sanksi yang diberikan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismelia Fathonah
NPM : 1621030278
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor”** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, 3 Maret 2020

Penulis,



Ismelia Fathonah

NPM : 1621030278



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR**

**Nama : Ismelia Fathonah
NPM : 1621030278
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP.197112041997032001**

**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP.-**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I
NIP 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR”**. Disusun oleh: **Ismelia Fathonah**, NPM: 1621030278, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal : Kamis, 03 Desember 2020.

TIM DEWAN SIDANG

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. (.....)

Penguji Utama : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khairuddin, M. H.
NIP. 196201221993031002

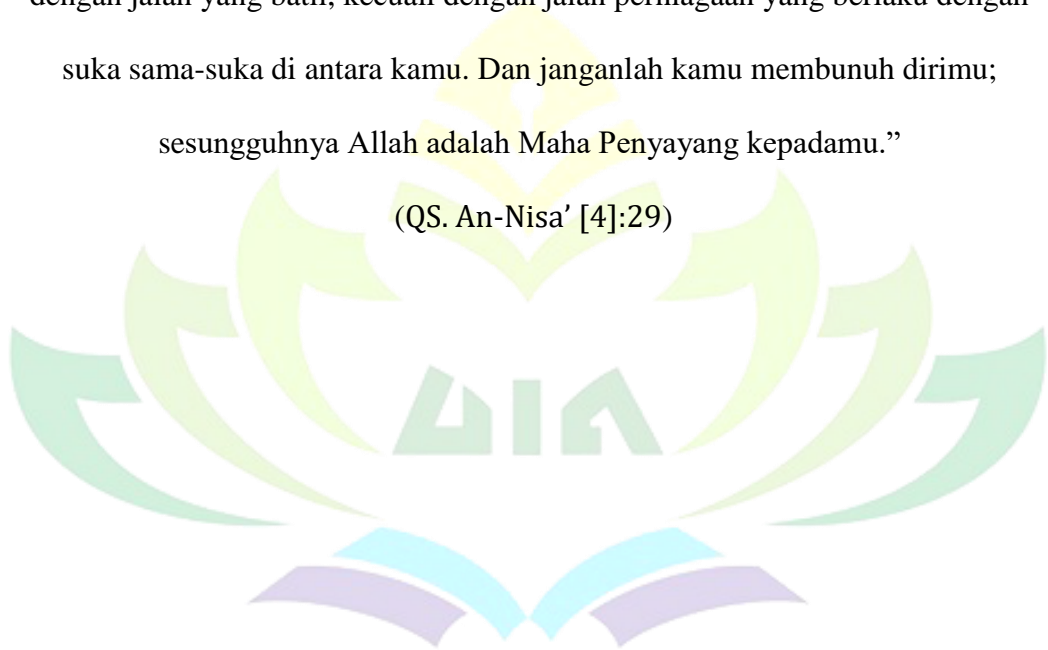
MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa' [4]:29)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT, atas takdir yang menjadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalankan kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Maka dari itu skripsi ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormatku yang tak terhingga, kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Ismail Akzom dan Ibunda Sampet yang telah membesarkanku, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran, tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan semua yang terbaik untukku.
2. Kakakku Redhoni Fadli dan kembaranku Mizaldi Fathoni yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku demi terwujudnya keberhasilanku.
3. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ismelia Fathonah dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara, pada tanggal 14 Oktober 1998, anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ismail Akzom dan Ibu Sampet. Berikut Riwayat Pendidikan penulis:

1. TK Wiyata Bhakti di Gedung Negara, Hulu Sungkai, Lampung Utara di selesaikan tahun 2004.
2. SDN 1 Gedung Negara, Hulu Sungkai, Lampung Utara di selesaikan tahun 2010.
3. SMPN 1 Hulu Sungkai, Lampung Utara di selesaikan tahun 2013.
4. SMA Yadika Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2016.
5. Tahun 2016, Penulis di terima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) melalui jalur UM-PTKIN.

Bandar Lampung, Maret 2020
Yang Membuat,

Ismelia Fathonah
NPM. 1621030278

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggenggam diri dan seluruh ciptaanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulis skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

6. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini terselesaikan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
11. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
12. Sahabat-sahabat *CFSquad* yakni A. Fikri Thia Naufal, Nezzi Amerta Saputri, Intan Maharani, Ita Purnama Sari, dan Mian Angelica Habeahaan. yang telah memberikan dukungan dan semangat agar segera menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat Berenom yakni Ani Setiawati, Reza Altedi, Hosinta Nur Asiah, Yusri Romodhon, A. Fikri Thia Naufal, dan Nezzi Amerta Saputri yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat agar segera menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat-sahabatku Fadillah Dwi Afridita, Ayu Wulandari, Hesty Anggina Sari, Tria Mei Diani, Olyvia Devita Pertiwi, Reni Anggraini, Tia Septiana, serta Mesi Indah Sari yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

15. Rekan-rekan Mahasiswa seperjuangan khususnya kelas F 2016 dan KKN Kelompok 170 yang selalu memberi dorongan dan semangat juang yang tiada hentinya.

16. Almamaterku tercinta.

Penulis berharap semoga amal kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Maret 2020
Penulis,

Ismelia Fathonah
NPM. 1621030278

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Signifikasi Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad.....	12
1. Pengertian Akad	12
2. Dasar Hukum Akad	14
3. Rukun Akad	16
4. Syarat Akad	21
5. Jenis-Jenis Akad	23
6. Berakhirnya Akad.....	30
B. Jual Beli	31
1. Pengertian Jual Beli	31
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	34
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	36
4. Macam-Macam Jual Beli.....	42
5. Jual Beli yang Dilarang	44
C. Pakaian Bekas	51
1. Pengertian Pakaian Bekas.....	51
2. Sejarah dan Fungsi Pakaian.....	51
3. Jenis-Jenis Pakaian Bekas	54
4. Dampak Negatif Pemakaian Pakaian Bekas.....	58
D. Tinjauan Pustaka.....	59

BAB III HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR

A. Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Hukum Positif	63
1. Dasar Hukum Larangan Impor Pakaian Bekas.....	63
2. Faktor Dilarang Impor Pakaian bekas	65
3. Sanksi Mengimpor Pakaian Bekas	67
B. Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Hukum Islam	69
1. Dasar Hukum dan Faktor Dilarang Impor Pakaian Bekas	69
2. Sanksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor	73

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor	77
B. Persamaan dan Perbedaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Rekomendasi	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
- Lampiran 2 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 3 Hasil Turnitin Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, guna memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, diperlukan adanya penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkandung di dalamnya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul. Judul skripsi ini adalah **“Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor”**. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena suatu obyek dengan memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia.¹

Hukum Positif atau *ius constitutum* adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan

¹Ratminto, Septi Antik Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 2.

²I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), h. 56.

Sunnah baik ketetapan yang secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*).³

Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴

Pakaian Bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.⁵

Impor adalah pemasukan barang dagangan dari luar negeri.⁶

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi penelitian ini adalah Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dalam memilih dan menentukan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor” adalah:

1. Alasan Objektif

Penelitian ini cukup menarik untuk diteliti, karena masih maraknya jual beli pakaian bekas impor yang dilakukan oleh pedagang tanpa memperdulikan bahaya yang ditimbulkan. Dalam Islam

³Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Dan Hukum Perundang-Undangan* (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016), h. 11.

⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1457 (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 366.

⁵Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pasal 1 ayat (2).

⁶Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2003), h. 181.

diperbolehkan untuk melakukan jual beli, namun Islam melarang jual beli yang dapat menimbulkan bahaya bagi umat manusia.

2. Alasan Subjektif

Pembahasan ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang dipelajari di bidang Muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan Agama yang mengatur jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang diterangkan didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu setiap Muslim harus memperhatikan mana yang dilarang (*haram*) dan yang mana diperbolehkan (*halal*).

Dalam kehidupan, manusia adalah makhluk sosial yang selalu memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terjadilah interaksi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, diperlukannya kerja sama antar manusia sehingga terjadilah jual beli.

Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dan transaksi jual beli. Jual beli termasuk dalam kegiatan muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu

kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'. Sesuai dengan ketetapan hukum artinya harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Pada saat ini jual beli mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan zaman, jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, tetapi dapat pula dilakukan antar negara, hal ini dinamakan ekspor dan impor. Jual beli pakaian bekas impor saat ini masih marak terjadi di Indonesia terutama jenis pakaian atau baju bekas dari Negara luar seperti: Perancis, Amerika Serikat, Belanda, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Hongkong dan Singapura. Hal ini menjadi lahan bisnis tersendiri bagi oknum-oknum tertentu yang memiliki cukup modal untuk mendirikan toko-toko dengan berbagai macam jenis pakaian bekas impor. Bahkan sudah diperjualbelikan di ritel modern hingga ke daerah-daerah.

Pakaian-pakaian tersebut dijual dengan harga bervariasi tergantung barang yang di jual, baik dengan harga terjangkau atau murah untuk sejenis pakaian tersebut, apabila dibandingkan dengan harga pakaian yang masih baru, hal inilah yang melatarbelakangi sebagian masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah lebih memilih membeli pakaian tersebut ketimbang membeli pakaian yang baru.

Secara hukum, mengimpor pakaian bekas sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Payung hukum tertinggi

diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1) dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan. Kemudian pada tahun 2015, secara khusus Kementerian Perdagangan membuat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan pakaian Impor bekas. Pasal 2 dalam Permendag ini disebutkan dengan jelas bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pakaian bekas impor berpotensi mengganggu kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat karena kandungan bakteri dan jamur berbahaya yang terdapat pada setiap pakaian impor tersebut. Selain itu, hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada industri tekstil di Indonesia.

Islam telah pula menjelaskan bahwasanya suatu transaksi perdagangan/jual beli dianggap sah apabila jual beli itu masih berpegang teguh pada ketentuan hukum Islam. Allah SWT Maha mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya. Sesuatu yang berbahaya bagi hamba-hambanya maka Allah SWT melarangnya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut didalam penelitian ini mengenai Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi pustaka dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini berkaitan. Penelitian ini fokus pada jual beli pakaian bekas yang dianalisis dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor?

F. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor.

G. Signifikasi Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khusus mengenai Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (*metdhos* = tata cara).⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari kajian keilmuan, di dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku *literature* dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Pada penelitian ini penulis mefokuskan untuk mencari data-data yang berkaitan dengan kegiatan jual beli.

⁷M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 21.

⁸Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta, sifat, dan hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer

Sumber/bahan Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁰ Dalam sumber primer yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, dan hukum positif yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas impor..

b. Sumber Sekunder

Sumber/bahan sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹¹ Sumber data yang diperoleh peneliti terdiri dari jurnal, tulisan-tulisan serta buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁹Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 47.

¹⁰Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 13.

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 54.

c. Sumber Tersier

Sumber/Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹² Sumber tersier antara lain, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan.¹³ Serta mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

5. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan

¹²Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, h. 13.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Ed.) Cet.4*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 236.

tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.¹⁴

- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, atau buku-buku *literature* lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika Bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁵

6. Analisis Data

Adapun analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder¹⁶, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

Penulis juga menggunakan metode komparatif yaitu suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengadakan perbandingan secara sistematis dan terus-menerus sehingga diperoleh kesimpulan. Penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan

¹⁴Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 75.

¹⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h.107.

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 107.

tentang benda-benda, orang, dan prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.¹⁷ Cara berfikir komparatif dalam penelitian ini dengan membandingkan data-data yang terkumpul dari hasil penelitian tentang persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas impor.



¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 114.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia.¹ Kata akad berasal dari bahasa Arab (الْعَقْدُ) yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.² *Al- 'Aqd* secara bahasa memiliki beberapa arti, antara lain:³

- a. Mengikat (*Ar-rabtu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*'aqdatun*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al- 'ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 76, yang artinya: “*Ya siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa.*”.

Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan akad. Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak

¹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 31.

²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

³Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 2

menempati posisi sentral karena hal itu merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai keterikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan aturan syara' sehingga memberikan dampak pada objek akad.⁶ Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam *ijab* dan *qabul*. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.⁷

Ijab dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan

⁴Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 5.

⁵Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 9.

⁶H.M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 9.

⁷Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badrul Zaman, (Bandung: Cipta Adiya Bhakti, 2001), h. 247.

pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Pencantuman kata “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya adalah bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dipandang sah jika tidak sejalan dengan kehendak atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *al-syar'i* (Allah dan Rasulnya), misalnya perjanjian untuk melakukan transaksi riba atau transaksi yang dilarang. Apabila *ijab* dan *qabul* telah dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya dan sesuai kehendak *syara'*, maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut. Misalnya, dalam jual beli, terjadi berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga barang yang dijualnya dari pembeli.⁸

Akad atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.⁹

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang menjelaskan akad harus dilaksanakan atas dasar konsensus, saling meridhai dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi,

⁸Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, h. 6.

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 71.

kejujuran, kebebasan, dan menghindari segala bentuk pelanggaran dalam berakad antara satu sama lain.¹⁰ Legitimasi hukum dilakukannya akad berdasarkan Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..” (Q.S.

Al-Maidah [5] : 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa' [4] : 29)

Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

Artinya: “Dari Abi Sa'id al-Khudri, Rasulullah saw., bersabda:

Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka rela.” (H.R. Ibnu Majah).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا
عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ مِنْهُ. رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ.

¹⁰Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 19.

Artinya: “Dari Anas bin Malik, Rasulullah saw., bersabda: Tidak halal harta seorang muslim kecuali dari atas kerelaan jiwanya.” (H.R. Daruquthni)

3. Rukun Akad

Secara bahasa, rukun berasal dari bahasa Arab, *al-Rukn*, yang berarti sisi, bagian dan fondasi. Secara istilah, rukun adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan yang menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan, baik ibadah maupun muamalah dan berada di dalam perbuatan tersebut. Sehingga, rukun akad adalah sesuatu yang menentukan dapat berlangsungnya atau tidak berlangsungnya suatu akad sekaligus menentukan sah atau tidak sahnya suatu akad.¹¹

Menurut Mazhab Hanafi rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yaitu serah terima (*ijab qabul*), sementara yang lainnya merupakan derivasi dari pengucapan (*shighat*), artinya *shighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*'aqid*) dan objek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Berbeda dengan pendapat mayoritas atau jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad (*'aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*) dan ungkapan (*shighat*), serta kebebasan orang yang berakad. Adapun rukun-rukun akad tersebut dijelaskan sebagai berikut:¹²

¹¹*Ibid.*, h. 20.

¹²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 22.

- a. Subjek/Pelaku akad, penjual dan pembeli atau pihak-pihak yang bertransaksi (*'Aqid*)

Pengertian *'aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki akad (*'aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.

Menurut ulama ahli fiqh memberikan persyaratan bagi *'aqid*, ialah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kriteria *ahliyah*, maksudnya adalah orang yang bertransaksi atau berakad harus cakap dan mempunyai kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya, orang yang telah memiliki *ahliyah* adalah orang yang sudah balig dan orang yang berakal.
- 2) Kriteria *wilayah*, maksudnya adalah hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas secara syar'i untuk melakukan objek akad. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak otoritas untuk mentransaksikannya.

- b. Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Objek akad (*ma'qud 'alaih*) adalah benda-benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin

seseorang dalam akad *kafalah*. Objek akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:¹³

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi yang dilakukan. Tidak dibolehkan melakukan transaksi terhadap objek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima.
- 2) Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan syariah untuk ditransaksikan (*mal mutaqawwin*) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas bangkai, darah babi dan lainnya. Begitu pula barang yang belum berada dalam genggamannya pemiliknya, seperti ikan masih dalam laut, burung dalam angkasa.
- 3) Objek akad bisa diserahkan saat terjadinya akad atau dimungkinkan dikemudian hari. Walaupun barang itu ada dan dimiliki 'aqid, namun tidak bisa diserahkan, maka akad itu akan batal.
- 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Dalam arti barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Objek transaksi tidak bersifat tidak diketahui (*majhul*) dan mengandung unsur *gharar*.
- 5) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis, syarat ini diajukan oleh ulama' selain mazhab Hanafiyah.

¹³*Ibid.*, h. 23

c. Substansi akad (*maudhu al- 'aqd*)

Substansi akad adalah maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam akad yang dilakukan. Hal tersebut menjadi penting karena berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Selama akadnya berbeda, maka tujuan pokok akad akan berbeda. Seperti misalnya dalam akad jual beli, maka tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

d. Serah terima (*sighat al- 'aqd* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.¹⁴ Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al- 'aqd* adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) *Sighat al-aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- 2) Harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda *lafadz*.
- 3) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling *ridha*.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi juga ada cara lain yang dapat

¹⁴*Ibid.*, h.24.

¹⁵Sohari Sohrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43.

menggambarkan kehendak yang berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:¹⁶

- 1) Lafaz atau perkataan yaitu cara alami dan mendasar untuk mengungkapkan keinginan yang tersembunyi, ia bisa dilakukan dengan semua lafaz yang menunjukkan adanya saling ridha dan sesuai dengan kebiasaan atau adat setempat, karena inti utama dalam setiap akad adalah keridhaan.
- 2) Melakukan akad dengan perbuatan atau saling memberi (akad dengan *mu'athah*), yaitu dengan melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridha tanpa adanya pelafazan *ijab* dan *qabul*.
- 3) Mengadakan akad dengan isyarat, isyarat adakalanya dari orang yang bisa bicara atau dari orang yang bisu.
- 4) Akad dengan tulisan yaitu akad sah dilakukan dengan tulisan antara dua pihak yang sama-sama tidak hadir dan dengan bahasa apa saja yang dipahami oleh kedua pengakad, dengan syarat tulisan tersebut jelas (artinya jelas bentuknya setelah dituliskan) dan formal (artinya ditulis dengan cara yang biasa dikenal luas di dalam masyarakat dengan menyebutkan orang yang diutus dan tanda tangan orang yang mengutus).

¹⁶Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 39.

4. Syarat Akad

Syarat menurut bahasa berarti tanda yang membedakan dari yang lain. Secara istilah, syarat adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan yang menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan, baik ibadah maupun muamalah dan berada di luar perbuatan tersebut.¹⁷ Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad sebagai berikut:¹⁸

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros, atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan '*aqid* yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu ada yang dilarang oleh syara'.
- e. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- f. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*. Maka orang yang ber*ijab* menarik kembali *ijab*nya sebelum *qabul*, maka *ijab*nya batal.
- g. *Ijab* dan *qabul* mestinya bersambung sehingga bila seseorang yang ber*ijab* sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut batal.

¹⁷Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah*, h. 20.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50.

Ada beberapa syarat pembentukan akad yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut: ¹⁹

- a. Syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara syariah. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka akadnya menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi yaitu:
 - 1) Syarat umum adalah rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat dan tidak dilarang oleh syara’.
 - 2) Syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya. Syarat khusus ini bisa disebut syarat tambahan (*idhafi*) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam akad nikah (*‘aqd al-jawaz*) dan keharusan penyerahan barang/objek pada *al-uqud al-ainiyyah*.
- b. Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syariah untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akadnya rusak. Menurut Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seorang dari enam kecacatan jual beli, yaitu: kebodohan, keterpaksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli yang rusak (*fasid*).

¹⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, h. 21.

- c. Syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas dengan apa yang ia miliki sesuai dengan aturan syariah, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharruf, sesuai dengan ketetapan syariah, baik dengan ketetapan asli yang dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (mewakili seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain: (1) Barang yang dijadikan objek akad itu harus miliknya orang yang berakad jika dijadikan tergantung dari izin pemiliknya yang asli, (2) Barang yang dijadikan objek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.
- d. Syarat kepastian hukum. Dalam pembentukan akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* dalam jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar* 'aib. Jika *luzum* tampak maka akad batal atau dikembalikan.

5. Jenis-jenis Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad.²⁰ Mengenai pengelompokkan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongannya. Secara garis besar ada pengelompokkan jenis-jenis akad, antara lain:²¹

²⁰Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 260.

²¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 76.

a. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:

- 1) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan *ridha* dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari *return* ataupun motif. Akad termasuk dalam kategori ini misalnya hibah, wakaf, *ibra'*, *wakalah*, dan lain-lain.
- 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini misalnya *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan lain-lain.

b. Akad menurut keabsahan terbagi kepada tiga jenis:

- 1) Akad *Sahih (Valid Contract)* yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
- 2) Akad *Fasid (Voidable Contract)* yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadinya perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mawquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).

3) Akad *Bathal* (*Void Contract*) yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.

c. Akad menurut namanya dibedakan menjadi:

- 1) Akad bernama (*al-'uqud al-musamma*) adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya. Misalnya akad jual beli.
- 2) Akad tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*) adalah akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka sepanjang zaman dan tempat. Misalnya *al-bai bi al-wafa'* (jual beli opsi).

d. Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi:

- 1) Akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Misalnya akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.
- 2) Akad *asesoir* (*al-'aqd at-tab'i*) adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah atau tidak sahnya akad tersebut. Misalnya akad penanguhan (*al-kafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin,

karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.

e. Akad dari segi unsur tempo di dalam akad, terbagi menjadi:

- 1) Akad bertempo (*al-'aqd az-zamani*) adalah akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Misalnya akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai dan lain-lain
- 2) Akad tidak bertempo (*al-'aqd al-fauri*) adalah akad di mana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Misalnya akad jual beli.

f. Akad dari segi formalitasnya, dibedakan menjadi:

- 1) Akad konsensual (*al-'aqd ar-radha'i*) dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa perlu formalitas tertentu. Meskipun kadang-kadang dipersyaratkan adanya formalitas tertentu, seperti harus menulis, hal tersebut tidak menghalangi keabsahan akad tersebut, dan tetap dianggap sebagai akad konsensual. Tulisan hanyalah suatu syarat yang diperlukan untuk pembuktian. Misalnya akad jual beli.
- 2) Akad formalistis (*al-'aqd asy-syakli*) adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat akad, di mana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah. Misalnya akad di luar lapangan hukum harta kekayaan, yaitu

akad nikah di mana di antara formalitas yang disyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang saksi.

- 3) Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, di mana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Misalnya akad hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang), dan gadai.

g. Akad dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh syara', dibedakan menjadi:

- 1) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, misalnya akad sewa-menyewa, mudharabah, jual beli, dan sebagainya.
- 2) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara' untuk dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur.

h. Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya dibagi menjadi:

- 1) Akad mengikat (*al-'aqd al-lazim*) adalah akad di mana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain.
- 2) Akad mengikat satu pihak yaitu akad di mana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama seperti akad *kafalah* (penanggungan) dan gadai (*ar-*

rahn). Adapun akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat penuh ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat (terbuka untuk di-*fasakh*), seperti akad *wakalah* (pemberian kuasa), *syirkah* (persekutuan), akad hibah, akad *wadi'ah* (penitipan) dan akad *'ariah* (pinjam pakai). (2) akad yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat *khiyar* bagi para pihak.

i. Akad menurut dapat dilaksanakannya dan tidak dapat dilaksanakannya, akad dibagi menjadi:

- 1) Akad *nafiz* adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, akad *nafiz* adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya.
- 2) Akad *mauquf*, adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan masih tergantung (*mauquf*) kepada adanya ratifikasin (*ijazah*) dari pihak berkepentingan. Misalnya, akad anak *mumayyiz* (berusia tujuh tahun hingga dewasa) yang tergantung kepada ratifikasi walinya dalam hal ia melakukan akad yang bersifat timbal balik, atau akad penerima kuasa yang melampaui batas pemberian kuasa yang tergantung kepada ratifikasi pemberi kuasa.

j. Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda terbagi menjadi:

- 1) '*Aqd adh-dhaman* adalah akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa.
- 2) '*Aqd al-'amanah* adalah akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan, akad pinjaman, perwakilan (pemberi kuasa)
- 3) akad bersifat ganda adalah akad yang di satu sisi merupakan akad tanggungan, tetapi di sisi lain merupakan akad amanah (kepercayaan). Misalnya akad sewa-menyewa di mana barang yang disewa merupakan amanah di tangan penyewa, akan tetapi di sisi lain, manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungannya sehingga apabila ia membiarkan barang yang disewanya setelah diterima tanpa ia memanfaatkan, maka manfaat barang yang tidak dinikmatinya adalah atas tanggungannya. Ia wajib membayar uang sewa kepada orang yang menyewakan.

6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa *khiyar*, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.²² Akad akan berakhir apabila:²³

- a. Terpenuhinya tujuan akad yaitu tercapainya apa yang menjadi tujuan akad. Dalam akad jual beli, pembeli telah memperoleh barang dan penjual telah menerima bayaran secara sempurna. Dalam akad sewa menyewa uang telah dibayar dan masa sewa telah berakhir.
- b. Pembatalan akad (*fasakh*) yaitu pembatalan akad disebabkan:
 - 1) Ketika akad rusak (*fasid*) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syariah Islam seperti jual beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Maka, transaksi berhenti sementara hingga dapat dipenuhi.
 - 2) Adanya hak *khiyar rukyah*, *khiyar 'aib* (cacat), *khiyar syarat*, atau *khiyar majelis*.
 - 3) Adanya pembatalan akad (*iqalah*) dari salah satu pihak karena adanya penyesalan atas akad yang telah dilakukan.

²²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 70.

²³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 58.

- 4) Tidak mungkin melaksanakan akad.
 - 5) Para pihak tidak memenuhi kewajiban yang timbul (*li'adam al-tanfidz*). Contohnya penjual mengatakan “saya akan menjual mobil ini kepadamu dalam waktu satu minggu”. Jika dalam waktu yang dijanjikan tidak terjadi pembayaran maka akad menjadi rusak.
 - 6) Masa akad berakhir seperti habisnya masa sewa yang tidak diperpanjang.
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya akad sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*.²⁴
- d. Tidak ada izin dari yang berhak. Pada akad yang bergantung pada pihak lain (*mawquf*) seperti akad *fudhuli* yang mesti ada izin pihak yang berwenang dan akad anak *mumayyiz*, maka akad berakhir apabila tidak mendapat izin dari yang berhak.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli sendiri dapat diartikan secara bahasa, baik dalam bahasa Arab jual beli (بيع) merupakan bentuk kata benda dari (باع). Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan شراء, yaitu bentuk

²⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2010), h. 109.

kata benda dari شَرَى yang artinya membeli. Namun pada umumnya kata-kata tersebut sudah mencakup keduanya. Dengan demikian, kata بَيْع yang berarti jual dan sekaligus dapat berarti beli.²⁵

Menurut bahasa jual beli berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang tersebut. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan *ijab qabul*.²⁶ Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.²⁷

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Menurut pendapat para ulama tentang pengertian jual beli yaitu:

1. Ulama Hanafiyah menyebutkan jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ
عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

²⁵Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Bogor: Guepedia, 2018), h. 13.

²⁶Syaikh Muhammad bin Qasim al-Gazy, *Study Fiqh Islam Versi Pesantren*, terjemahan Hufaflibrary, Cet. I, (Surabaya: Tiga Dua 1994), h. 6.

²⁷W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 32.

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).”²⁸ Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

2. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual beli adalah :

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

Artinya: “Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.”

3. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* menyebutkan jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.”

4. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-bay'u* (البيع) sebagai:²⁹

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “Menukar sesuatu dengan sesuatu.”

Sehingga yang dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu akad yang di dalamnya terjadi tukar menukar barang dengan barang lain atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak

²⁸Eny Latifah, *Pengantar Bisnis Islam*, (Purwodadi: Sarnu Untung, 2020), h.71.

²⁹Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan dan sesuai ketentuan syara'. Misalnya penjual memperoleh harga barang miliknya (uang) dari pembeli dan pembeli memperoleh barang dari penjual.³⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.³¹

Legitimasi hukum dilakukannya jual beli berdasarkan Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

(Q.S. Al-Baqarah [2] : 275)

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli." (Q.S. Al-

Baqarah [2] : 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تَجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

³⁰Ainul Yaqin, *Fiqh: Kajian Tematik Ibadah, Perdata, dan Pidana Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 60.

³¹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 24.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ [4] : 29)

Dasar Hukum berdasarkan Al-Sunnah antara lain:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: “Rasulullah saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi)

Sementara legitimasi dari ijma’ adalah ijma’ ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberikan legitimasi dan memberikan batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.³²

³²*Ibid.*, h. 25.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli tidak akan sah tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.³³ Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan (*al-Ta'ati*). Menurut yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.³⁴ Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidan* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada yang barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*) dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada kerugian.³⁵

³³Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), h. 4.

³⁴Supriadi, *Konsep Harga*, h. 21.

³⁵Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, h. 25.

a. Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu:³⁶

1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*.

Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan balig, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah.

2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya.

³⁶*Ibid.*, h. 26.

- 2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah jual beli air laut yang masih di laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.
- 4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan di lautan atau burung yang berada di awang, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Sementara syarat yang terkait *ijab* dan *qabul* ada tiga, yaitu:

- 1) *Ijab dan qabul* harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*, tahu akan hak dan kewajibannya. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad dan bukan syarat *shigat* akad. Berkaitan dengan syarat ini, maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai kriteria dan memenuhi syarat tersebut.
- 2) Kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan penjual. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari *ijab* yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli

menjawab lebih singkat dari *ijab* yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran.

- 3) *Ijab dan qabul* dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena alasan. Adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah, meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi, karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak.

b. Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua, yaitu:³⁷

- 1) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
- 2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

³⁷*Ibid.*, h. 28.

c. Syarat keabsahan akad jual beli (*syurut al-sihhah*) ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:

- 1) Barang dan harganya diketahui (nyata).
- 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
- 3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
- 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

- 1) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan.
- 2) Diketuinya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah* dan *wadi'ah*.
- 3) Barang dan harga pengantinya sama nilainya.
- 4) Terpenuhiya syarat *salam*, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli *salam*.

- 5) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

Selain syarat di atas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak mana pun.
- 2) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
- 3) Bebas dari *gharar*.
- 4) Bebas dari riba.

Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah atau tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad *fasid*. Menurut ulama kalangan Hanafiyah, akad *fasid* adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

- d. Syarat mengikat (*syurut al-luzum*) dalam jual beli³⁸

Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya para pihak yang melakukan akad jual beli:

³⁸*Ibid.*, h. 30.

- 1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- 2) Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir. Selama hak *khiyar* belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

Apa pun bentuk jual beli, apa pun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.³⁹

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:⁴⁰

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli *salam*, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, jual beli ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

⁴⁰Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 274.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian:⁴¹

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Akad jual beli yang dilakukan perantara adalah penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.
- c. Akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (*mu'athah*) adalah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ada *sighat (ijab qabul)* antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli. Namun sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 77.

membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ada *ijab qabul* terlebih dahulu.

5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi:⁴²

- a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini yaitu:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, *khamar* (minuman yang memabukkan). Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه أبو داود وأحمد)

Artinya: “Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

- 2) Jual beli sesuatu yang belum jelas, bersifat spekulasi atau samar-samar (*gharar*) haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. *Gharar* yang dimaksud adalah tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga,

⁴²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 80.

dan waktu penyerahan barang.⁴³ Jual beli yang dilarang karena samar-samar seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Ada 3 bentuk jual beli *gharar* yaitu (1) *bai' ma'dum* yaitu jual beli di mana barangnya tidak ada atau fiktif. (2) *bai' ma'juzi at-taslim* yaitu jual beli di mana barangnya tidak bisa diserahkan. (3) *bai' majhul* yaitu jual beli di mana kualitas, kuantitas, dan harga barang tidak diketahui.⁴⁴ Jual beli yang dilarang karena samar-samar seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Rasulullah saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung *gharar*”. (HR. Muslim 3/156 dan Bukhari 11/264)

- 3) Jual beli bersyarat. Jual beli yang *ijab qabul*nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Misalnya ketika *ijab qabul* si pembeli berkata “baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku” atau sebaliknya si penjual berkata “ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”. Dalam kaitan ini Nabi saw. bersabda:

⁴³Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 64.

⁴⁴Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 85.

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ
(متفق عليه)

Artinya: “Setiap syarat yang tidak terdapat dalam *kibaullah* maka ia batal walaupun seratus syarat”. (Disepakati oleh Bukhari dan Muslim)

- 4) Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti misalnya salib, buku-buku porno. Sebagaimana firman Allah (Q.S. Al-Maidah [5] : 2) :

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “...dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini. Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ فِي الْبَيْعِ فَرَّقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد)

Artinya: “Barangsiapa memisahkan antara induk dan anaknya, nanti Allah akan memisahkan dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat”. (HR. Ahmad)

- 6) Jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- 8) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- 9) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini

dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab qabul*.

- 10) Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

Jual beli tersebut di atas dilarang, berdasarkan hadist Rasulullah saw.:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُخَاظَلَةِ وَالْمُخَاَصَرَةِ وَالْمَلَا مَسَةِ وَالْمُنَا بَذَةِ وَالْمُرَابَّنَةِ (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Anas r.a berkata: Rasulullah saw. telah melarang jual beli *muhaqalah*, *mukhadharah*, *mulamasah*, *munabadzah*, dan *muzabanah*”. (HR. Bukhari)

- b. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli, yaitu:⁴⁵

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رواه البخارى و مسلم)

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 82.

Artinya: “Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti berkata “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

- 3) Jual beli dengan *najasyi* yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang oleh agama. Rasulullah saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص م عَنِ النَّجَشِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Rasulullah saw. telah melarang jual beli dengan *najasyi*”. (HR. Bukhari dan Muslim)

- 4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu. Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Rasulullah saw. bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain”. (HR. Bukhari dan Muslim)

- 5) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْخَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (رواه ابن ماجه والحاكم)

Artinya: “Dari Umar bin al-Khaththab telah bersabda Rasulullah saw.: Saudagar itu diberi rezeki, sedangkan yang menimbun itu dilaknat”. (HR. Ibnu Majah dan Hakim)

- 6) Jual beli barang rampasan dan curian. Islam melarang bagi umatnya untuk membeli barang yang diketahuinya adalah hasil perbuatan yang tidak halal. Membeli barang tersebut artinya bekerja sama untuk berbuat dosa.⁴⁶ Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا
(رواه البيهقي)

Artinya: “Barangsiapa yang membeli barang curian sedangkan ia tahu bahwa itu barang curian maka ia ikut dalam dosa dan kejelekannya”. (HR. Ibnu Majah dan Hakim)

⁴⁶Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 35.

C. Pakaian Bekas

1. Pengertian Pakaian Bekas

Dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditemukan pengertian pakaian bekas, yang ada pengertian tentang pakaian adalah benda yang dipakai.⁴⁷ Bekas adalah sesuatu yang sudah pernah dipakai.⁴⁸ Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.,⁴⁹ dan tidak dijelaskan lebih lanjut. Maka dapat disimpulkan pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia yang sudah atau telah dipakai sebelumnya.

2. Sejarah dan Fungsi Pakaian

Sandang atau pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sementara ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun yang lalu. Menurut mereka homo sapiens, nenek moyang kita berasal dari Afrika yang gerah. Sebagian mereka berpindah dari satu daerah ke negara lain, dan bermukim di daerah dingin. Sejak saat itulah mereka berpakaian yang bermula dari kulit hewan guna menghangatkan badan mereka. Sekitar 25.000 tahun yang lalu barulah

⁴⁷Wahyu, Suzana, Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang Kata, 2013), h. 437.

⁴⁸Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia : Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), h. 56.

⁴⁹Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Pakaian Impor Bekas, Pasal 1.

ditemukan cara menjahit kulit, dan dari sana pakaian semakin berkembang.⁵⁰

Semua manusia membutuhkan pakaian. Kelompok nudis pun yang menganjurkan menanggalkan pakaian, bahkan merasa membutuhkannya, paling tidak saat mereka merasakan sengatan dingin. Masyarakat Tuareg di Gurun Sahara, Afrika Utara, menutupi seluruh tubuh mereka dengan pakaian, agar terlindungi dari panas matahari dan pasir yang biasa berterbangan di gurun terbuka itu. Masyarakat yang hidup di kutub mengenakan pakaian tebal yang terbuat dari kulit agar menghangatkan tubuh mereka.

Di sisi lain, pakaian juga berkaitan dengan rasa keindahan. Misalnya seorang yang berada di pedalaman Papua ketika memakai koteka ratusan tahun lalu, pastilah merasa ada unsur keindahan yang ditampilkannya, sebagaimana halnya seorang diplomat negara maju yang mengenakan jas dan *black tie* pada acara-acara khusus. Di sisi lain, seorang yang memiliki aib pada bagian tubuhnya, akan berusaha mengenakan pakaian tertentu untuk menutupinya. Jika di lengan seseorang ada bekas luka yang menonjol, maka diduga keras ia akan mengenakan pakaian berlengan panjang untuk menutupinya. Namun, ukuran keindahan berubah-ubah serta berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004) h. 33.

Pakaian dapat memberikan dampak psikologis bagi pemakainya. Seseorang saat akan ke pesta dengan memakai pakaian sehari-hari, pasti merasa riku, sebaliknya, seseorang akan lebih percaya diri dengan memakai pakaian istimewa. Pakaian juga dapat memberi dampak psikologis bagi yang melihatnya. Para hakim di beberapa negara memakai *wig* (rambut palsu penutup kepala) antara lain guna memberi kesan wibawa di hadapan yang hadir di persidangan. Di Indonesia misalnya, ada yang sengaja memakai serban agar memberi kesan kesalehan atau ketekunan beragama.

Sementara negara menetapkan pakaian-pakaian dengan model dan warna tertentu bagi angkatan perangnya, untuk membedakannya dengan angkatan perang negara lain, karena pakaian dapat menjadi pembeda antara seseorang bahkan masyarakat dengan yang lain. Bahkan ada lambang-lambang dan tanda-tanda khusus dalam angkatan bersenjata, untuk membedakan status dan pangkat seseorang. Begitulah fungsi pakaian sebagai pembeda atau pengenal.

Pakaian berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat. Di Jepang, wanita memakai kimono. Kini tersebar diseluruh dunia pakaian jas buat pria. Walau jas pada mulanya dipakai oleh buruh pabrik untuk menunjukkan rasa tidak senang kepada para bangsawan yang berpakaian mewah, tetapi kini sebaliknya, justru orang-orang kaya dan berkedudukan sosial tinggi yang memakainya.

Agama memperkenalkan pula pakaian-pakaian khusus, baik untuk beribadah atau tidak. Dalam ajaran Islam, ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah ada pakaian-pakaian khusus buat pria yakni yang tidak berjahit. Di Iran, ayatullah-ayatullah/agamawan ada yang memakai serban putih dan juga serban hitam. Itu untuk membedakan keduanya dari segi garis keturunan.

Pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral. Dari sini lahir apa yang dinamai pakaian tradisional, daerah, dan nasional, juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu, dan pakaian tertentu untuk profesi tertentu, serta pakaian untuk beribadah. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian dari tuntutan agama pun lahir dari budaya masyarakat, karena agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat sehingga menjadikan adat istiadat sebagai salah satu pertimbangan hukum. “*Al-Adat Muhakkamah*”, demikian kaidah yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum Islam.

3. Jenis-Jenis Pakaian Bekas

Jenis pakaian mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan tuntutan zaman. Berikut ini jenis-jenis pakaian⁵¹ bekas yang banyak beredar di pasaran:

⁵¹Wahab, *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia*, (Semarang: Alprin, 2010), h. 37.

a. Kemeja

Kata kemeja berasal dari bahasa Portugis, *camisa*, yaitu sebuah baju atau pakaian atas, terutama untuk pria. Pakaian ini menutupi tangan, bahu, dada sampai ke perut.

Nama lain kemeja adalah kamisa, yang masih dekat dengan bentuk aslinya. *blus* dari bahasa Perancis, terutama untuk wanita. Serta *hem* dari bahasa Belanda.

b. *T-Shirt*

T-Shirt atau kaos oblong adalah jenis pakaian yang menutupi sebagian lengan, seluruh dada, bahu dan perut. Kaos oblong biasanya tidak memiliki kancing, kerah, ataupun saku. Bahan yang umum digunakan untuk membuat kaos oblong adalah katun atau poliester (atau gabungan keduanya). Mode kaos oblong meliputi mode untuk wanita dan pria, serta dapat dipakai semua golongan usia, termasuk bayi, remaja, ataupun orang dewasa.

Asal muasal nama inggrisnya *T-Shirt*, tidak diketahui secara pasti. Teori yang paling umum diterima adalah nama T-Shirt berasal dari bentuknya yang mempunyai huruf T, atau dikarenakan pasukan militer sering menggunakan pakaian jenis ini sebagai *training shirt*. Kaos oblong pada mulanya digunakan sebagai pakaian dalam. Namun sekarang kaos oblong juga dipakai sebagai pakaian sehari-hari.

c. Jaket

Jaket adalah pakaian pelindung yang dipakai diluar, umumnya berbahan tebal sehingga dapat melindungi tubuh dari udara dingin.

d. Celana

Celana adalah pakaian bawahan yang dipakai untuk menutupi dari pinggang sampai kaki. Ada dua kategori umum dari celana, yaitu celana pendek dengan ukuran dari pinggang sampai lutut atau kurang, dan celana panjang dengan ukuran dari pinggang sampai tumit. Celana juga banyak modelnya, misalnya *legging*, dan lain-lain.⁵²

e. Rok

Rok adalah sejenis pakaian dengan bentuk pipa atau kerucut yang cara pemakaiannya dimulai dari pinggul dan menutupi sebagian atau seluruh bagian kaki. Berbeda dengan celana, bagian rok tidak dibagi menjadi bagian kaki kiri dan bagian kaki kanan tetapi langsung menjadi satu bagian yang menutupi sebagian atau seluruh bagian kaki. Rok biasanya digunakan oleh wanita, meskipun di beberapa negara ada juga yang digunakan oleh kaum pria seperti di Skotlandia. Jenis-jenis rok yaitu rok panjang, rok mini, gaun, dan sorjan.⁵³

f. Kaus Kaki

Kaus kaki adalah garmen yang dirajut untuk menutupi kaki manusia. Kaus kaki dirancang untuk beberapa kegunaan seperti mengurangi gesekan antara kaki dan alas kaki, membuat kaki tetap

⁵²*Ibid.* h. 39.

⁵³*Ibid.* h. 40.

hangat, menyerap keringat, dan sebagainya. Warna kaus kaki beraneka ragam, walaupun umumnya berwarna gelap untuk pakaian resmi dan putih untuk olahraga atau acara santai.

g. Sarung Tangan

Sarung tangan adalah sejenis pakaian yang menutupi tangan, baik secara sebagian ataupun secara keseluruhan. Fungsi sarung tangan yaitu untuk melindungi sang pemakai dari pengaruh lingkungan sekitarnya atau melindungi lingkungan sekitar dari tangan sang pemakai. Ada beberapa jenis sarung tangan yaitu termis, mekanis, kimia, pelindung infeksi. Selain itu sarung tangan dipakai sebagai hiasan atau untuk alasan mode.

h. Dasi

Dasi adalah hiasan yang dipakai dileher⁵⁴ kemeja dan bergantung didada. Dasi biasanya digunakan oleh kaum pria sebagai busana formal. Namun wanita pun kini banyak yang menggunakan dasi sebagai aksesoris busana. Ada beberapa jenis dasi yaitu dasi kupu-kupu, *bolo tie*, *ascot* atau yang juga disebut *cravat*. Meskipun bentuknya berbeda, fungsinya tetap sama yaitu sebagai hiasan sehingga dapat membuat penampilan seseorang menjadi semakin *elegan*.⁵⁵

⁵⁴Dessy Anwar, *Kamus Lengkap*, h. 120.

⁵⁵“Dasi, Aksesoris Para Eksekutif” (Online), tersedia di : <http://lifestyle.okezone.com/read/2010/03/08/194/310115/dasi-aksesori-para-eksekutif> (22 Juli 2020)

i. Topi

Topi adalah suatu jenis pakaian yang digunakan di kepala. Topi biasanya memiliki pucuk tinggi dengan satu atau dua tepi. Topi dapat diletakkan di kepala atau pada beberapa jenis topi pada perempuan, dilengkapi dengan penyangkutan topi. Topi biasanya dipakai untuk melindungi kepala dari sengatan panas matahari.⁵⁶

j. Pakaian Dalam

Pakaian dalam adalah pakaian yang dikenakan di bawah pakaian lainnya, seringkali langsung bersentuhan dengan kulit.⁵⁷ Beragamnya model, harga terjangkau, bermerek dan berkualitas bagus menjadi alasan konsumen membeli produk pakaian bekas impor termasuk pakaian dalam seperti celana dalam dan bra.⁵⁸

4. Dampak Negatif Pemakaian Pakaian Bekas

Pakaian bekas yang dari impor ilegal selain melanggar regulasi, menurut Widodo selaku Direktur Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan kementerian mengandung bakteri sampai 216 ribu koloni pergram dan

⁵⁶Wahab, *Ensiklopedia Kebutuhan*, h. 42.

⁵⁷“Pakaian Dalam” (On-line), tersedia di : http://id.wikipedia.org/wiki/pakaian_dalam (17 Oktober 2020)

⁵⁸“Ini Alasan Konsumen Beli Bra dan Celana Dalam Bekas Impor di Pasar Senen” (On-line), tersedia di: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2823480/ini-alasan-konsumen-beli-bra-dan-celana-dalam-bekas-impor-di-pasar-senen> (17 Oktober 2020)

jamur 36 ribu koloni. Dengan membeli produk pakaian bekas, masyarakat juga merendahkan harkat dan martabat bangsa.⁵⁹

Di dalam pakaian bekas mengandung bakteri dan jamur yang berbahaya untuk kesehatan manusia seperti bakteri *E. coli* yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan (diare), bakteri *S. aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia, serta jamur seperti *Aspergillus spp.* dan *Candida spp.* yang dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin. Beberapa bakteri dan jamur tersebut hidup dalam debu dan tahan terhadap pendidihan selama 30 menit. Jadi, merebus pakaian bekas bukan merupakan cara yang sepenuhnya efektif untuk membunuh bakteri dan jamur.⁶⁰

Lebih jauh, pakaian bekas impor dapat membunuh pelaku industri garmen kecil dan konveksi. Sebab masyarakat lebih tergiur dengan harga murah yang ditawarkan tanpa perlu tahu asal usul pakaian tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada kurangnya penyerapan tenaga kerja.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah mengemukakan hasil penelitian yang terdahulu berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan. Tinjauan pustaka memuat telaah singkat, dan sistematis tentang permasalahan yang digali mengungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian.

⁵⁹“Ini Bahaya Gunakan Pakaian Bekas Impor” (On-line), tersedia di: <http://liputan6.com/bisnis/read/2191248/ini-bahaya-gunakan-pakai-bekas-impor> (17 Oktober 2020)

⁶⁰Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, “Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas”, 2015, h. 25.

Berikut ini penulis paparkan beberapa judul skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian, diantaranya yaitu:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, oleh : Istianah. 2015.⁶¹

Hasil penelitian: “berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari al-Qur’an maupun hadist sebagaimana yang ada dalam pembahasan mengenai *gharar*, praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidakjelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan”.

2. “Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di Kota Salatiga)”, oleh : Dita Septika. 2016.⁶²

Hasil penelitian: “dalam praktik jual beli pakaian impor bekas yang ada di kota Salatiga, peneliti menarik kesimpulan bahwa jika dilihat dari jual beli yang dilakukan pembeli dan penjual tidak ada masalah, karena kedua belah pihak sama-sama ridho, yang menjadi masalah adalah antara penjual pakaian impor bekas dan pemerintah Indonesia, hal ini dikarenakan penjual memasukan pakaian impor bekas

⁶¹Istiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, (Skripsi program Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

⁶²Dita Septika Wati, “Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di Kota Salatiga)”, (Skripsi program Sarjana Hukum, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2016).

dengan cara ilegal. Itu sama saja dengan tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat pemerintah Indonesia, dan kemampuan serah terima antara pemerintah Indonesia dengan penjual pakaian impor bekas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, bisa disimpulkan praktik ini jual beli pakaian impor bekas yang ada di kota Salatiga merupakan jual beli yang sifatnya *gharar* dan artinya jual beli pakaian bekas impor haram”.

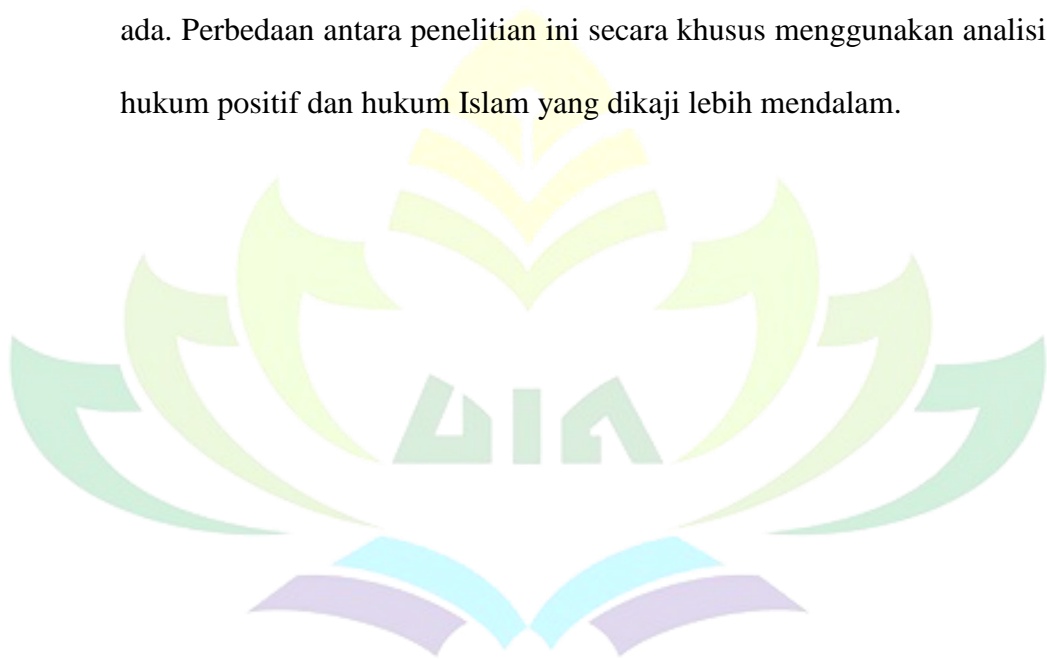
3. “Minat Konsumen Dalam Memilih Pakaian Bekas Di Pasar Sumpang Kota Parepare (Kontestsasi Hukum Ekonomi Islam)”, oleh : Nur Awalia. 2019.⁶³

Hasil penelitian, “bahwa: (1) Minat Konsumen dalam memilih pakaian bekas (*cakar*) dalam penelitian ini tidak terbatas pada satu kelompok karakter saja. Konsumen *cakar* berasal dari semua jenis kelamin, lapangan pekerjaan, pendidikan dan besarnya pendapatan. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen dalam memilih *cakar* yaitu pertama faktor ekonomi, di mana konsumen sangat memperhitungkan harga dalam membeli sebuah pakaian. Kedua yaitu faktor lingkungan di mana lingkungan memberikan pengalaman kepada konsumen sehingga dapat mempengaruhi minat dan tingkah laku seseorang baik dari lingkungan keluarga, teman, dll. Faktor lain karena *cakar* kualitasnya bagus dengan harga yang murah, bahkan ada yang masih baru yang mempunyai merek-merek bagus dan modelnya masih merupakan model terbaru. Dalam hukum ekonomi Islam tidak melarang

⁶³Nur Awalia, “Minat Konsumen Dalam Memilih Pakaian Bekas Di Pasar Sumpang Kota Parepare (Kontestasi Hukum Ekonomi Islam)”. (Skripsi program Sarjana Hukum, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2019).

manusia untuk memenuhi kebutuhannya ataupun keinginannya selama pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan mampu menambah *maslahah* dan tidak mendatangkan *mudharat*".

Dengan demikian dari beberapa skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun dan mengkaji, memiliki spesifikasi tersendiri dibandingkan penelitian-penelitian lain. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada. Perbedaan antara penelitian ini secara khusus menggunakan analisis hukum positif dan hukum Islam yang dikaji lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Yogyakarta: 2010.

Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Alim Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 642/MPP/Kep/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230/MPP/Kep/1977 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Buku

Abubakar, Ali, dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

al-Qathtan, Manna, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Antik Winarsih, Septi, dan Ratminto, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Anwar, Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya: Amelia, 2003.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Astawa, I. Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.

Bhinadi, Ardito, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman, Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Salma Idea, 2014.
- _____, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah*, Parepare: Nusantara Press, 2020.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Jauhar, Ahmad Al-Musri Husain, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Karim, Adiwarman, dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kautun, Ranny *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Latifah, Eny, *Pengantar Bisnis Islam*, Purwodadi: Sarnu Untung, 2020.
- Lihasanah, Ahsan, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*, Mesir: Dar as-Salam, 2008.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Muhammad, Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mustofa, Imam *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Pudjihardjo, H.M., dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.
- _____, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, Malang: UB Press, 2019.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, "Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas", 2015.
- Rohmaniyah, Wasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Sahroni, Oni, dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sholihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Dan Hukum Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sohrani, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, Bogor: Guepedia, 2018.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh Muhammad bin Qasim al-Gazy, *Study Fiqh Islam Versi Pesantren*, terjemahan Hufalibrary, Cet. I, Surabaya: Tiga Dua 1994.
- Tika, Moh. Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Umam, Khairul, dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Untara, Wahyu, *Kamus Bahasa Indonesia : Edisi Revisi*, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.
- Wahab, *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia*, Semarang: Alprin, 2010.
- Wahid, Nur, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Wahyu, Suzana, Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: Ruang Kata, 2013.
- Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- , *Fiqh: Kajian Tematik Ibadah, Perdata, dan Pidana Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Skripsi

- Istiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, (Skripsi program Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).
- Dita Septika Wati, “Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di Kota Salatiga)”, (Skripsi program Sarjana Hukum, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2016).
- Nur Awalia, “Minat Konsumen Dalam Memilih Pakaian Bekas Di Pasar Sumpang Kota Parepare (Kontestasi Hukum Ekonomi Islam)”. (Skripsi program Sarjana Hukum, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2019).

Sumber on-line

“Pakaian Dalam” (On-line), tersedia di :
http://id.wikipedia.org/wiki/pakaian_dalam (17 Oktober 2020)

“Ini Alasan Konsumen Beli Bra dan Celana Dalam Bekas Impor di Pasar Senen” (On-line), tersedia di: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2823480/ini-alasan-konsumen-beli-bra-dan-celana-dalam-bekas-impor-di-pasar-senen> (17 Oktober 2020)

“Ini Bahaya Gunakan Pakaian Bekas Impor” (On-line), tersedia di:
<http://liputan6.com/bisnis/read/2191248/ini-bahaya-gunakan-pakai-bekas-impor> (17 Oktober 2020)

“Hadang Impor Pakaian Bekas, Pemerintah Terbitkan Permendag” (Online), tersedia di : <http://liputan6.com/bisnis/read/2272173/hadang-impor-pakaian-bekas-pemerintah-terbitkan-permendag> (22 Juli 2020)

“5 Fakta Soal Impor Pakaian Bekas Merajalela di Indonesia” (On-line), tersedia di: <https://www.merdeka.com/uang/5-fakta-soal-impor-pakaian-bekas-merajalela-di-indonesia.html> (18 Oktober 2020)

“Pemerintah Siapkan Perpres Larangan Peredaran Pakaian Bekas” (On-line), tersedia di : <https://www.suara.com/news/2015/07/14/031100/pemerintah-siapkan-perpres-larang-peredaran-pakaian-bekas> (18 Oktober 2020)

